

## HASIL MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

### A. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo tidak hanya merupakan wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata namun merupakan komitmen DLH dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, dan memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Untuk mencapai hal tersebut diatas DLH mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman dan arahan bagi pengambil kebijakan/keputusan dilingkungan OPD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### B. Pencapaian sasaran sesuai delapan area perubahan Reformasi Birokrasi

#### 1. Manajemen Perubahan:

##### a. Pencapaian hasil.

- 1) Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 660/1230-LH/I/2019 , tanggal 24 Januari 2019.
- 2) Telah dilakukan sosialisasi melalui rapat pembinaan pegawai dan dalam pelaksanaan apel pagi.

##### b. Evaluasi.

- 1) Belum seluruh tugas dilaksanakan oleh tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja.
- 2) Belum dilakukan monev rencana kerja secara berkala.
- 3) Program reformasi birokrasi terus memberikan dampak positif secara bertahap pada perubahan kinerja organisasi.

#### 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan:

##### a. Pencapaian hasil.

b. Evaluasi

- 1) Intensifikasi, monitoring dan evaluasi atas pengembangan SDM masih perlu dilaksanakan.

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Pelaksanaan kegiatan

- 1) Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra.
- 2) Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

b. Evaluasi

- 1) Sudah melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala
- 2) Sudah melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik

7. Penguatan pengawasan

a. Pelaksanaan kegiatan

1. Gratifikasi

- a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi dan kemungkinan penyalahgunaan anggaran,
- b. Percepatan pemberantasan korupsi,
- c. Pencegahan korupsi telah dilakukan secara berkala dalam bentuk *banner* slogan anti korupsi dan arahan pimpinan pada setiap pertemuan.

2. Penerapan SPIP

Telah disusun Satgas SPIP, telah dilakukan pemantauan pengendalian intern melalui monitoring dan evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan pengendalian SPIP.

3. Pengaduan masyarakat

Telah disusun kebijakan pengaduan pelayanan pajak berupa SOP Penanganan Aduan terhadap Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

4. Whistle Blowing System

Pembentukan Tim WBS dan sudah dilakukan sosialisasi atas Tim tersebut.

b. Evaluasi

- b. Evaluasi
  1. Perlu dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan.
  2. Perlu dilakukan penataan yang lebih intens terhadap sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi:
  - a. Pencapaian hasil.
    - 1) Evaluasi telah dilakukan untuk menilai ketepatan fungsi
    - 2) Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan struktur organisasi sebagai bentuk penataan organisasi
  - b. Evaluasi
    - 1) Masih perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk menilai ketepatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Penataan Tatalaksana
  - a. Pencapaian hasil
    - 1) Sudah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi, proses kegiatan telah dipetakan dan diwujudkan dalam bentuk SOP
    - 2) Telah dilakukan pengembangan e-government
  - b. Evaluasi
    - 1) Agar dibuatkan kajian peta proses bisnis sesuai dengan tugasnya masing-masing yang mungkin sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.
    - 2) Perlu dikembangkan e-government secara menyeluruh
5. Penataan sistem manajemen SDM
  - a. Pencapaian hasil
    - 1) Perencanaan kebutuhan pegawai telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. didasarkan atas analisis jabatan dan beban kerja seluruh pegawai.
    - 2) Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai..
    - 3) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 2) Evaluasi atas penanganan pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan belum dibuat secara berkala.
  - 3) Penanganan benturan kepentingan sudah disosialisasikan keseluruh pegawai.
  - 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara berkala.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik:
- a. Pelaksanaan kegiatan.
    - 1) Terdapat kebijakan standart pelayanan yang mencakup kejelasan waktu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur.
    - 2) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Informasi pelayanan dapat diakses melalui webside dan papan pengumuman.
  - b. Evaluasi.
    - 1) Review dan perbaikan atas standart pelayanan telah dilakukan namun belum optimal.
    - 2) Menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai kode etik dan pelayanan prima secara berkelanjutan
    - 3) Menyempurnakan sarana layanan secara terpadu dan terintegrasi

Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program manajemen perubahan yang akan dilaksanakan adalah melakukan intensifikasi pelaksanaan RB ke seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pencapaian program Reformasi Birokrasi sudah berjalan dengan baik dan sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan.

Wates, 5 Januari 2020  
Ketua Tim Pelaksana

